



**PEMERINTAH
KABUPATEN DONGGALA**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH P-RKPD TAHUN 2024



BUKU I

**PERATURAN BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2024**



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Donggala sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Perubahan, untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi daerah dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun 2023 harus digunakan Tahun 2024;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 853

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	<i>i</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Latar Hukum Penyusunan	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sitematika Dokumen Perubahan RKPD	I-4
 BAB II EVALUASI PELAKANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-1
2.2. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-2
2.3. Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II-11
2.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	II-12
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.2. PDRB Per Kapita	III-7
3.1.3. Indeks Gini	III-8
3.1.4. Tingkat Kemiskinan	III-9
3.1.5. Rasio Penduduk yang Bekerja	III-12
3.1.6. Perbandingan Target Indikator Makro	III-14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-14
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-15



3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-15
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-21
3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-24
3.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan	III-24
3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah	IV-21
4.2.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024	IV-21
4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	IV-31
4.2 Pokok-pokok Pikiran DPRD.....	IV-32

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KAB. DONGGALA TAHUN 2025

5.1. Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah	V-2
5.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.....	V-8

BAB VI PENUTUP	VI-1
-----------------------------	-------------



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Donggala Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II-2
Tabel	2.2	Predikat Kinerja Program RKPD Kabupaten Donggala Triwulan II Tahun 2024	II-12
Tabel	3.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Donggala (persen), 2021–2023	III-2
Tabel	3.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Donggala (miliar rupiah), 2021–2023	III-3
Tabel	3.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Donggala (miliar rupiah), 2021–2023	III-5
Tabel	3.4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Donggala, 2021–2023	III-6
Tabel	3.5	Nilai dan Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Kabupaten Donggala Tahun 2021-2023 (ribu rupiah)	III-8
Tabel	3.6	Indeks Gini Kabupaten Donggala Tahun 2021-2023	III-9
Tabel	3.7	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023	III-9
Tabel	3.8	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023	III-10
Tabel	3.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023	III-11
Tabel	3.10	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023	III-11
Tabel	3.11	Garis kemiskinan Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023	III-12
Tabel	3.12	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Donggala Tahun 2020-2023	III-13
Tabel	3.13	Perbandingan Target Indikator Makro	III-14
Tabel	3.14	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2023 s/d 2024 Kabupaten Donggala	III-20
Tabel	3.15	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2023 s/d 2024 Kabupaten Donggala	III-23
Tabel	3.16	Proyeksi/Target Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024	III-25
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024	IV-3



Tabel	4.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024	IV-15
Tabel	4.3	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024	IV-22
Tabel	4.4	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Perubahan	IV-24
Tabel	4.5	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	IV-31
Tabel	5.1	Ringkasan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang Dikelompokkan Berdasarkan Misi, Tujuan Urusan dan OPD Penanggung jawab Kabupaten Donggala Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024	V-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD Tahun 2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

- a. sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

- a. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- b. memberikan dasar hukum penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2024; dan
- c. memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2024 meliputi:

- a. perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
- b. perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terdiri dari:
 1. perubahan realisasi dan proyeksi/target pendapatan tahun 2024;
 2. perubahan realisasi dan proyeksi/target belanja tahun 2024; dan
 3. perubahan realisasi dan proyeksi/target pembiayaan tahun 2023.
- c. perubahan matrik rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024.



1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perencanaan pembangunan tahun 2024 Kabupaten Donggala merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Perencanaan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, hasil evaluasi RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja RPJMD sampai tahun 2022, rencana capaian kinerja dalam RKPD Tahun 2024, pokok-pokok pikiran/jaring aspirasi masyarakat dari DPRD, identifikasi isu strategis, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan juga memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Tema dan prioritas pada Tahun Anggaran 2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Donggala tahun 2024 adalah “Pemantapan Kualitas Pembangunan Sebagai Daerah Penyangga IKN Serta Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Penurunan Stunting”. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan implementasi Kabupaten Donggala sebagai daerah penyangga bagi IKN di Provinsi Kalimantan Timur
2. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan angka stunting
3. Penataan Manajemen ASN berbasis Kompetensi
4. Penyediaan SDM sesuai kebutuhan Daerah
5. Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan fokus pada sektor Pariwisata, Pertanian, Peternakan, perikanan dan perkebunan.



pembangunan daerah dalam RKPD, perlu dilakukan evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Donggala sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada tahun 2024 yang akan dievaluasi :

- a. Jumlah Program : 253 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 639 Kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 2.093 Sub Kegiatan
- d. Jumlah PD : 53 PD
- e. Pagu Belanja Daerah : Rp. 1.413.684.134.854,00

2.2 Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 19 Tujuan Daerah dengan 21 Indikator dan 51 Sasaran Daerah dengan 51 Indikator yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Donggala
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKPD	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPD %	KET
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Inovatif		Indeks Persepsi Korupsi	4,1	0	0	Sangat Rendah
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP	67	Sedang
			Indeks Kepuasan Masyarakat	3,45	0	0	Sangat Rendah
		Meningkatnya Kapabilitas dan profesionalisme aparatur	Rata-rata Nilai Rapor Kinerja ASN pada semua Perangkat Daerah	76	0	0	Sangat Rendah



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKPD	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPD %	KET
		Terciptanya suasana kondusif, kerukunan dan solidaritas antar warga masyarakat	Persentase Terjadinya Perkelahian masyarakat/ Perkelaian Antar Desa (PAD)	0%	0%	100	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia	Persentase terjadinya konflik di masyarakat yang bernuansa SARA	0%	0%	100	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kesiagaan Masyarakat menghadapi bencana alam	Persentase Menurunnya jumlah korban bencana	75%	95%	79	Rendah
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang efektif dan transparan	Meningkatnya pelayanan Publik yang cepat dan Prima	Persentase PD yang melayani masyarakat tepat dan cepat	80%	25%	31	Sangat Rendah
		Mewujudkan administrasi kearsipan dan pelestarian dokumen daerah	Persentase tingkat pengelolaan kearsipan sesuai standar teknis	80%	39,00%	49	Sangat Rendah
3	Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang merata	Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang sosial	Persentase peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang sosial	90%	40,00%	44	Sangat Rendah
4	Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya (Pemerintah dan Masyarakat)	Optimalnya peran aktif aparatur pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang membuat Dokumen Perencanaan sesuai standar teknis	54 OPD	53 OPD	98	Sangat Tinggi



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKPD	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPD %	KET
		Meningkatnya partisipasi Masyarakat secara konstruktif dalam pelaksanaan program pembangunan (<i>pembangunan partisipatif</i>)	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang	90%	87%	97	Sangat Tinggi
5	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi (semua terdapat di bumi baik yang hidup maupun yang mati yang berguna bagi manusia)	Terkelolanya sumber daya hutan secara berkelanjutan, produktif dan bermutu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan	Persentase luasan hutan Produktif yang dikelola masyarakat yang ramah lingkungan	70%	44%	63	Rendah
		Meningkatnya luas hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR) yang berorientasi pada kearifan lokal	Persentase meningkatnya HTR, HKM, HD dan HR sesuai kearifan lokal	70%	0%	0	Sangat Rendah
		Meningkatnya peran aktif dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam	Persentase luasan hutan yang terjaga kelestarian SDA sesuai standar teknis	80%	56%	69	Sedang
		Meningkatnya penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat khususnya daerah terpencil dan kepulauan	Rasio Elektrifikasi daerah terpencil dan Kepulauan	100%	0%	0	Sangat Rendah



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKPD	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPD %	KET
6	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (Pasar/DUDI)	Lahirnya regulasi yang dapat menjamin peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan	Jumlah Perkada tentang peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan yang diterbitkan	4 perubub	0 Perubub	0	Sangat Rendah
		Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Kelompok Usaha Mikro yang mengalami peningkatan aset	1.500 KUM	KUM	NA	NA
		Meningkatnya kerjasama ekonomi, kegiatan ekspor dan perdagangan dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan volume Ekspor komoditas unggulan daerah	18%	0	0	Sangat Rendah
		Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mengalami peningkatan aset	8 Sentra	1 Sentra	13	Sangat Rendah
		Terwujudnya Penataan Struktur Industri dan Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra-sentra industri potensial yang terbentuk	6 Sentra	1 Sentra	17	Sangat Rendah
7	Mengembangkan obyek wisata	Terlaksananya Inventarisasi Destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang terinventarisir secara lengkap	45 OW	96 OW	213	Sangat Tinggi
		Meningkatnya aksesibilitas obyek wisata	Jumlah destinasi wisata yang memiliki	20 OW	3 OW	15	Sangat Rendah



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKP	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKP %	KET
			akses memadai				
8	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata guna meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, beriman dan bertaqwa	Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas	Persentase capaian SPM pendidikan	80%	66,34%	83	Tinggi
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar	Persentase Guru (PAUD, SD, SMP) memiliki kualifikasi S1 atau D4	85%	97,92%	115	Sangat Tinggi
		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Persentase standar sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	65%	41%	63	Rendah
9	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata guna meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, beriman dan bertaqwa	Terwujudnya pembentukan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal	Jumlah Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal	25 lembaga	3 Lembaga	12	Sangat Rendah
10	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan gratis	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat JKM	30.550 Orang	186.924 Orang	612	Sangat Tinggi
		Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah rumah sakit, puskesmas, Pustu dan Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan	2 RS, 22 PKM	2 RS, 18 PKM	100 82	Sangat Tinggi Tinggi



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/RKPD	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPD %	KET
			yang memadai	80 Puskesmas 25 Pustu	116 Puskesmas 70 Pustu	145 280	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Persentase peningkatan Tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai standar	30%	21%	70	Sedang
		Tersedianya obat yang berkualitas	Persentase jumlah jenis obat yang tersedia sesuai kebutuhan	60%	100%	167	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase balita penderita Gizi Buruk	0,01%	1,15%	115	Sangat Tinggi
11	Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Terwujudnya Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera	Persentase Keluarga yang menerapkan pola hidup sehat	75%	9%	12	Sangat Rendah
12	Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya ketersediaan Fasilitas olahraga	Persentase fasilitas olahraga yang tersedia secara memadai sesuai cabang olahraga	40%	0,00%	0	Sangat Rendah
		Meningkatnya Pengembangan Potensi dan peran serta pemuda	Persentase peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	75%	0,00%	0	Sangat Rendah
13	Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan Peran Perempuan	Terwujudnya pengarusutamaan Gender	Persentase angka diskriminasi terhadap perempuan	5%	0,0013%	384615	Sangat Tinggi



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKPDP	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPDP %	KET
		Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aspek	Persentase perempuan dalam keanggotaan DPRD dan keterlibatan Perempuan dalam pemerintahan dan keorganisasian	35%	10%	29	Sangat Rendah
		Terwujudnya pemenuhan Hak perempuan dan anak	Persentase pemenuhan hak perempuan dan anak	85%	100,00%	118	Sangat Tinggi
14	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Terwujudnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang membuka keterisolasian wilayah	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap pada wilayah (Kecamatan dan Desa) tertinggal)	55%	20,25%	37	Sangat Rendah
		Terwujudnya pengelolaan sungai, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik	65%	45,58%	70	Sedang
15	Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan (Darat dan Laut) yang memadai dan berfungsi dengan baik	55%	18%	33	Sangat Rendah
16	Mewujudkan Penataan Ruang dan Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai perda	100%	79,71%	80	Tinggi



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKPDP	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPDP %	KET
		Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan Lingkungan Perumahan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase pengelolaan lingkungan perumahan yang memenuhi standar teknis	100%	0%	0	Sangat Rendah
17	Mewujudkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan konservasi sumber daya alam	Terwujudnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	81,29%	78,76%	126	Sangat Tinggi
		Terwujudnya Perlindungan dan Pengendalian kawasan konservasi	Persentase terjaganya kawasan konservasi	100%	0%	0	Sangat Rendah
18	Mewujudkan Reformasi Agraria dan Penyelesaian konflik pertanahan	Terwujudnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase pemilik tanah yang memiliki sertifikat	70%	0	0	Sangat Rendah
19	Mewujudkan Kualitas hidup masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal	Persentase pertumbuhan ekonomi sector potensi unggulan daerah	6,50%	0,00%	0	Sangat Rendah
		Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan	Persentase penurunan masyarakat miskin	13,82	16,25	85	Sangat Rendah



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/ RKP	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKP %	KET
		Terbangunnya sistim dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang kuat, berdaya saing dan mandiri	Jumlah BUMDesa yang berfungsi secara aktif	158 BUMDes	96 BUMDes	61	Rendah
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan berkeadilan gender	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan Gender	50%	0%	0	Sangat Rendah
		Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat	Persentase fasilitas publik yang ramah bagi anak dan perempuan	35%	0%	0	Sangat Rendah
		Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat	Persentase TPAK	80%	66,57%	83	Tinggi
		Menguatnya kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak dan efektifnya kerjasama PPA, LSM dan jaringan lainnya yang koseran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,00%	55,07%	0	Sangat Rendah
		Berkembangnya aktivitas agribisnis dan agroindustri, serta agropolitan pada lokasi	Jumlah Kawasan Tertentu cepat tumbuh sesuai potensi	6 Kawasan	4 Kawasan	67	Sedang



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (RPJMD)/RKPD	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN RKPD %	KET
		yang potensial dan prospektif	unggulan kawasan perdesaan				

Sampai dengan triwulan II ini, dari 55 indikator kinerja daerah, masih menggunakan data realisasi tahun 2023 oleh karena belum adanya data terbaru dari instansi terkait. terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) indikator masih berada pada predikat sangat rendah ($\leq 50\%$), 4 (Empat) indikator memiliki tingkat capaian rendah (51% - 65%), 4 (empat) indikator memiliki tingkat capaian sedang (66% - 75%), 4 (empat) indikator memiliki tingkat capaian tinggi (76% - 90%), dan 15 (lima belas) indikator memiliki tingkat capaian sangat tinggi (91% - 100%). Sedangkan 1 (satu) indikator capaiannya tidak tersedia datanya.

Secara umum, data capaian kinerja tujuan dan sasaran daerah masih menggunakan data capaian tahun 2023. Beberapa hal yang menyebabkan masih sangat rendahnya kinerja tujuan dan sasaran daerah adalah :

1. Masih rendahnya penerapan standar operasional pelayanan (SOP) oleh perangkat daerah.
2. Terjadinya peralihan kewenangan dari tingkat kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dimana pengelolaan hutan dan listrik bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten sehingga beberapa indikator yang terdapat dalam tujuan dan sasaran tidak tergambar realisasinya.

2.3 Capaian Kinerja RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024.

Adapun kinerja program dalam RKPD triwulan II tahun 2024 dari 253 Indikator Kinerja Program terdapat 15 (lima belas) program dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), predikat kinerja Tinggi (T) ada pada 22 (dua puluh dua) program, predikat Sedang (S) ada 16 (enam belas) program, predikat Rendah (R) ada 2 (dua) program, dan predikat kinerja Sangat Rendah (SR) ada pada 198 (seratus Sembilan puluh delapan) program. Predikat kinerja program RKPD triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Predikat Kinerja Program dan RKPD Kabupaten Donggala
Triwulan II Tahun 2024

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	PREDIKAT KINERJA	JUMLAH PROGRAM RKPD	PERSENTASE %
1	91% - 100%	Sangat Tinggi	15	5,93%
2	76% - 90%	Tinggi	22	8,70%
3	66% - 75%	Sedang	16	6,32%
4	51% - 65%	Rendah	2	0,79%
5	≤ 50%	Sangat Rendah	198	78,26%
Jumlah			253	

Sumber : BAPPEDA Donggala, Tahun 2024

2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Faktor penghambat utama dalam pencapaian kinerja triwulan II tahun 2024 yaitu : Imbas dari keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208 tahun 2022 dilakukannya refocusing anggaran melalui dua kali perubahan penjabaran APBD tahun 2023 yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan program kegiatan.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Kondisi ekonomi yang mulai membaik
1. Dukungan pemerintah pusat
2. Komitmen pemerintah daerah untuk mencapai target kinerja
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan



Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan selanjutnya yaitu :

1. Agar setiap Perangkat Daerah tetap mengacu pada dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan;
2. Agar setiap perangkat daerah memperhatikan hasil evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan program kegiatan sebelumnya;
3. Agar Perangkat daerah memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas.



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Donggala Tahun 2023 serta prediksi Tahun 2024 serta memuat pendapatan, belanja dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sesuai dengan kondisi perekonomian daerah Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024, maka perekonomian suatu daerah sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Perkembangan kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Capaian indikator ekonomi Kabupaten Donggala Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan Indikator Makro ekonomi jangka panjang sehingga ditekankan pada prosesnya pencapaiannya, tidak sekedar pada output (nilai pertumbuhan itu sendiri). Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber-sumber yang dimiliki daerah antara lain, peranan modal (investasi).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin besar kemampuan suatu daerah menghasilkan barang dan jasa, secara agregat semakin besar pula kemampuan ekonomi di wilayah tersebut. Kemampuan ekonomi sangat penting dalam menopang pembangunan karena sumber daya ekonomi itulah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Walaupun prestasi pembangunan



dapat juga dilihat dari pendekatan non ekonomi, namun tolok ukur dari sisi pendapatan tetap saja relevan dan paling lazim diterapkan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala, dalam kurun waktu 2021 - 2023 disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Donggala (persen), 2021–2023

No.	Sektor	Laju Pertumbuhan (%)		
		2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,74	2,89	2,71
B	Pertambangan dan Penggalian	3,13	9,97	16,42
C	Industri Pengolahan	3,82	4,47	2,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	5,27	4,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,06	2,60	2,23
F	Konstruksi	3,33	1,31	0,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	7,86	4,27
H	Transportasi dan Pergudangan	1,23	6,83	2,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,59	10,46	6,87
J	Informasi dan Komunikasi	5,69	5,98	5,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,02	-3,39	0,16
L	Real Estate	1,53	5,03	4,80
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	5,78	4,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	-1,61	2,18
P	Jasa Pendidikan	0,03	-0,58	2,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	3,26	2,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,65	2,64	3,14
PDRB		4,64	3,86	4,68

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

Tabel 3.1 menunjukkan Peningkatan tertinggi sektor ekonomi pada Tahun 2023 terjadi di beberapa sektor antara lain, Pertambangan dan Penggalian 16,42, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,87. Sementara itu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 0,18 dari tahun sebelumnya sebesar 2,81.

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 3,86 menjadi 4,68 ditahun 2023. Hal ini disebabkan sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha unggulan yang menjadi penopang ekonomi di Kabupaten Donggala selama kurun lima tahun terakhir. Kemudian Sektor usaha yang belum mengalami perkembangan signifikan terdapat di sektor Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, *Real Estate*, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan jasa lainnya. Sektor – sektor tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk mendongkrak pencapaian di sektor tersebut.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Donggala (miliar rupiah), 2021–2023

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 521,02	4 975,56	5 348,57
B	Pertambangan dan Penggalian	1.986,88	2.359,18	2 887,88
C	Industri Pengolahan	290.09	310,25	323,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,31	1,40	1,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,33	25,56	26,78
F	Konstruksi	1.965,62	2.059,93	2 179,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	1.140,21	1.289,17	1 390,13
H	Transportasi dan Pergudangan	285,97	326,60	346,32



Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58,51	65,49	70,82
J	Informasi dan Komunikasi	315,01	334,47	352,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	251,81	265,96	271,04
L	Real Estate	132,46	142,37	159,25
M, N	Jasa Perusahaan	10,98	11,88	12,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.199,11	1.226,59	1 280,77
P	Jasa Pendidikan	199,56	203,28	210,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92,66	97,44	103,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	82,81	85,71	90,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.558,32	13.769,85	15 055,53

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

Angka PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Tinggi rendahnya kemajuan daerah yang diukur dengan nilai PDRB diyakini akan memberikan peluang ekonomi yang akhirnya menumbuhkan berbagai kondisi sektoral yang diperlukan sehingga distribusi pendapatan sektoral di daerah tersebut mencerminkan struktur ekonominya. Pemerintah dan investor menggunakan struktur ekonomi wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan sektoral dan memantau perkembangannya dengan melihat pergeseran struktur ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2 PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha mencapai 15.05 triliun rupiah, meningkat sebesar 1.28 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 13.76 triliun rupiah.



Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Donggala (miliar rupiah), 2021–2023

Kategori	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.418.580	3.517,42	3 612,59
B	Pertambangan dan Penggalian	1.187.480	1.305,92	1 520,28
C	Industri Pengolahan	201,50	210,52	216,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,26	1,33	1,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	18,86	19,35	19,78
F	Konstruksi	1.095,55	1.109,86	1 118,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	826,35	891,28	929,33
H	Transportasi dan Pergudangan	204,12	218,05	224,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40,70	44,96	48,05
J	Informasi dan Komunikasi	262,33	278,01	293,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	181,83	175,66	175,93
L	Real Estate	95,24	100,03	104,83
M, N	Jasa Perusahaan	7,88	8,34	8,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	750,07	737,97	754,02
P	Jasa Pendidikan	139,73	138,91	141,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59,07	60,99	62,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	53,89	55,32	57,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.544,44	8.873,91	9 289,25

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)



Tabel 3.3 memberikan informasi terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha yang mencapai 9.28 triliun rupiah pada Tahun 2023, meningkat dari tahun sebelumnya 8.87 triliun rupiah atau naik sebesar 415,34 Milyar .

Dengan demikian, secara umum PDRB Kabupaten Donggala mengalami Peningkatan nilai tambah sektoral yang ditentukan oleh perkembangan masing-masing sub sektor, yang berasal dari komoditi-komoditi yang termasuk dalam klasifikasi sektor tersebut.

Data perkembangan distribusi PDRB setiap sektor usaha Kabupaten Donggala Tahun 2021-2023 secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Donggala, 2021–2023

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36,00	36,10	35,53
B	Pertambangan dan Penggalian	15,82	17,12	19,18
C	Industri Pengolahan	2,31	2,25	2,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	~0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,19	0,18
F	Konstruksi	15,65	14,95	14,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	9,08	9,35	9,23
H	Transportasi dan Pergudangan	2,28	2,37	2,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,47	0,48	0,47
J	Informasi dan Komunikasi	2,51	2,43	2,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	1,93	1,80
L	Real Estate	1,05	1,03	1,06
MN	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09



No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,55	8,90	8,51
P	Jasa Pendidikan	1,59	1,48	1,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,71	0,69
RST U	Jasa lainnya	0,66	0,62	0,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Donggala adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai hampir separuh dari keseluruhan PDRB, yaitu sebesar 36,00 persen tahun 2021 dan mengalami peningkatan menjadi 36,10 persen pada tahun 2022, dan pada Tahun 2023 menurun menjadi 35,53 persen. besarnya kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tersebut terjadi peningkatan selama kurun tahun 2021-2023. Peranan terbesar urutan kedua pada tahun 2023 yakni sektor pertambangan dan pengalihan yaitu sebesar 19,18 persen. Sedangkan peranan terbesar ketiga pada sektor konstruksi sebesar 14,48 persen, dan di urutan keempat Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 9,23 persen.

3.1.2 PDRB Per Kapita

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan yang paling penting, karena untuk itulah pembangunan dilaksanakan. Penghitungan PDRB yang melibatkan adanya penduduk di dalamnya disebut PDRB perkapita, sebab dihitung dengan membagi nilai PDRB total dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dengan harapan dapat mewakili jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan.

PDRB perkapita digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan penduduk. Walaupun angka ini menunjukkan ukuran secara agregat, namun sampai sekarang masih dianggap sebagai ukuran yang cukup relevan. Berikut ini disajikan data PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Donggala terus meningkat dari tahun ke tahun, baik



Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 pada periode 2021-2023 sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.5
Nilai dan Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Donggala Tahun 2021-2023 (ribu rupiah)

PDRB Perkapita	TAHUN		
	2021	2022	2023
ADH Berlaku (Rp000)	41,481	45,101	48,83
Pertumbuhan (%)	5,94	8,60	8,28
ADH Konstan (Rp000)	28,223	29,042	30,130
Pertumbuhan (%)	3,69	2,90	3,75

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

Dari Tabel 3.5, terlihat PDRB perkapita Kabupaten Donggala Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 48.830.000 juta, meningkat dari tahun sebelumnya 2022 yaitu Rp 45.101.000 juta atau dengan laju pertumbuhan sebesar 8,28 persen. Sedangkan PDRB perkapita Tahun 2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp 30.130.000 juta meningkat dari tahun sebelumnya 2022 yaitu Rp29.042.000 juta dengan laju pertumbuhan sebesar 3,75 persen.

3.1.3 Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menghitung kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat adalah konsep koefisien gini (indeks Gini). Indeks Gini mempunyai nilai dari nol (merata mutlak) hingga 1,0 (tidak merata mutlak). Indeks Gini dengan nilai nol menunjukkan bahwa semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendapatan yang sama. Sementara itu, jika koefisien Gini memiliki angka 1, hal ini menunjukkan bahwa semua pendapatan di wilayah tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) orang penduduk. Koefisien Gini dengan angka nol dan satu adalah tidak pernah terjadi dalam suatu perekonomian. Sehubungan dengan besarnya angka Gini koefisien yang digunakan untuk menentukan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar masyarakat, maka digunakan kriteria sebagai berikut: jika angka Gini koefisien berada pada: 1) 0 sampai dengan 0,3, maka memiliki tingkat kesenjangan rendah, 2) di atas

0,3 sampai dengan 0,4, maka memiliki tingkat kesenjangan moderat, dan 3) lebih besar dari 0,4 memiliki tingkat kesenjangan tinggi. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Indeks Gini Kabupaten Donggala Tahun 2021-2023

No.	Indeks Gini	2021	2022	2023
1	Realisasi Donggala	0,261	0,280	0,237
2	Realisasi Sulawesi Tengah	0,316	0,308	0,304
3	Realisasi Nasional	0,381	0,381	0,388

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

3.1.4 Tingkat Kemiskinan

1. Jumlah Penduduk Miskin

Selama Periode 2021-2023, penduduk miskin Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari 51.23 ribu jiwa di Tahun 2021 menjadi 50.22 ribu jiwa di Tahun 2022, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 50.23 ribu jiwa. Namun penduduk miskin Sulawesi Tengah terjadi fluktuasi dari 404.440 ribu jiwa di Tahun 2021 menurun menjadi 389.710 ribu jiwa di Tahun 2022, namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 395.66 ribu jiwa.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023

Uraian	Jiwa		
	2021	2022	2023
Donggala	51.230	50.220	50.230
Sulawesi Tengah	404.440	389.710	395.660
Nasional (Juta Jiwa)	27,54	26,36	25,90

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala, Sulteng, dan Nasional Tahun 2021-2023. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Donggala mengalami penurunan dari 16,73 persen di Tahun 2021 menjadi 16,30 persen di Tahun 2022. Dan



pada Tahun 2023 kembali menurun menjadi 16,25 persen, namun posisi Kabupaten Donggala tertinggi kedua diantara Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Demikian pula Persentase Penduduk Miskin Sulteng juga mengalami penurunan dari 13,00 persen di Tahun 2021 menjadi 12,33 persen di Tahun 2022 dan terjadi peningkatan di tahun 2023 menjadi 12,41. sedangkan Persentase Penduduk Miskin Nasional mengalami penurunan di Tahun 2021 sebesar 13,10 persen menurun menjadi 9,54 persen di Tahun 2022, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 9,36 persen. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Donggala maupun Sulteng, berada di atas persentase penduduk miskin nasional.

Tabel 3.8
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Donggala,
Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023

Uraian	(%)		
	2020	2021	2022
Donggala	16,73	16,30	16,25
Sulawesi Tengah	13,00	12,33	12,41
Nasional	13,10	9,54	9,36

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Donggala, Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023. Data P1 mengindikasikan bahwa bila P1 meningkat, maka jumlah penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Selama Periode 2021-2022, P1 Kabupaten Donggala meningkat dari 2,76 poin di Tahun 2021 menjadi 2,82 poin di Tahun 2022, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 2,65 poin. P1 Sulteng mengalami penurunan dari 2,43 poin di Tahun 2021 menjadi 2,41 poin di Tahun 2022, dan tahun 2023 menjadi 2,12 poin, namun P1 Nasional mengalami penurunan dari 1,67 poin di Tahun 2021 menjadi 1,56 poin di tahun 2022 dan pada tahun 2023 menurun menjadi 1,53 poin. Angka indeks ini mengindikasikan diperlukan adanya strategi terpadu saling sinergi antara Pemerintah Kabupaten Donggala dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.

Tabel 3.9
**Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Donggala,
Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023**

Uraian	(P1)		
	2020	2021	2022
Donggala	2,76	2,82	2,65
Sulawesi Tengah	2,43	2,41	2,12
Nasional	1,67	1,56	1,53

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

4. Indeks Keparahana Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahana Kemiskinan di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulteng dan Nasional selama periode 2020-2022. Angka ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka P2, maka semakin timpang disparitas antar sesama rumah tangga miskin (RTM), sebaliknya, semakin rendah P2, maka semakin merata dan/atau semakin sempit kesenjangan antar RTM. Selama periode tersebut, angka P2 mengalami penurunan di Kabupaten Donggala, begitu pula dengan Propinsi, namun Nasional mengalami peningkatan, ini berarti semakin merata/sempit disparitas antar sesama RTM.

Tabel 3.10
**Indeks Keparahana Kemiskinan di Kabupaten Donggala,
Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023**

Uraian	(P2)		
	2021	2022	2023
Donggala	0,70	0,72	0,63
Sulawesi Tengah	0,64	0,68	0,54
Nasional	0,42	0,38	0,38

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

5. Garis Kemiskinan

Selama periode 2021-2023, Garis kemiskinan kabupaten Donggala terus mengalami peningkatan dari Rp.369.784,00 di Tahun 2021 menjadi Rp 395.028,00 di Tahun 2022 dan Rp.421.493,00 di Tahun 2023. Kenaikan Garis Kemiskinan Kabupaten



Donggala pada Tahun 2023 masih berada dibawah rata-rata Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

Garis Kemiskinan Sulteng naik dari Rp.496.872,00 di Tahun 2021 menjadi Rp.530.251,00 di Tahun 2023 dan di tahun 2023 menjadi Rp.568.248,00. Di Tahun 2021-2023 Garis Kemiskinan Nasional berada di bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sulteng.

Tabel 3.11
Garis kemiskinan Kemiskinan di Kabupaten Donggala,
Sulteng dan Indonesia Tahun 2021-2023

Uraian	(Rp)		
	2021	2022	2023
Donggala	369.784	395.028	421.493
Sulawesi Tengah	496.872	552.561	568.248
Nasional	450.185	535.547	550.458

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

3.1.5 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.

Indikator rasio penduduk yang bekerja menyangkut tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan tingkat Pengangguran. Yang dimaksud dengan Rasio Penduduk yang Bekerja adalah rasio Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja terhadap Jumlah Tenaga Kerja. Angkatan Kerja (AK) adalah jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) yang diperoleh dari perhitungan Jumlah Tenaga Kerja (TK), yaitu penduduk berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun dikurangi dengan Jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK). Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia di antara 15 sampai dengan 65 tahun yang tidak sedang mencari pekerjaan



(karena sedang sekolah, ibu rumah tangga, dan alasan lain yang membuat mereka tidak sedang mencari pekerjaan).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan output dan pendapatan. Peningkatan output dan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (kenaikan daya beli). Tabel 3.12 berikut disajikan tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja di Kabupaten Donggala.

Tabel 3.12 memberikan informasi bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Donggala menunjukkan hasil yang berfluktuasi dari Tahun 2020 sampai dengan 2023. dimana terdapat TPT sebesar 2,58 persen pada tahun 2020 dan di tahun 2020 naik menjadi 3,5 persen namun kembali menurun menjadi 2,84 persen ditahun 2022 dan di tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 2,79 persen. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Donggala masih lebih rendah dari TPT Provinsi Sulawesi Tengah.

Dilihat dari Realisasi TPAK Kabupaten Donggala dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 juga menunjukkan hasil yang berfluktuasi, Dimana Realisasi TPAK Kabupaten Donggala pada tahun 2020 sebesar 63,93, tahun 2021 sebesar 67,47 walaupun sempat mengalami peningkatan ditahun 2022 menjadi 72,03 tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 66,57.

Tabel 3.12
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabuptaen Donggala
Tahun 2020-2023

No.	Indikator Rasio Penduduk yang Bekerja	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Realisasi TPAK Kab. Donggala	63,93	67,47	72,03	66,57
	TPAK Prov. Sulteng	69,44	68,73	69,99	69,85
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Donggala	2,58	3,5	2,84	2,79
	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Sulawesi Tengah	3,77	3,75	3,00	2,95
3	Rasio Penduduk yang Bekerja Kab. Donggala	97,42	96,50	97,16	97,21



No.	Indikator Rasio Penduduk yang Bekerja	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
	Rasio Penduduk yang Bekerja Prov. Sulawesi Tengah	96,23	96,25	97,00	97,05

Sumber : BPS, Kabupaten Dalam Angka 2024 (data diolah)

3.1.6 Perbandingan Target Indikator Makro

Perbandingan indikator target indikator makro ekonomi pada dokumen RKPD Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dan RPKD Perubahan Tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Perbandingan Target Indikator Makro

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD 2024	TARGET APBD 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,72	5,72	4,68 - 5,11
2	Presentase Penduduk Miskin	15,87	15,87	15,30 – 15,18
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50	3,50	2,79 – 2,66
4	Indeks Pembangunan Manusia	66,47	66,47	68,17 – 70,19
5	Stunting	23,28%	23,28%	20,47 – 15,28
6	Gini Rasio	0,31	0,31	0,237 – 0,210

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2019 - 2024, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib,



efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah :

- a. Belum disesuaikannya regulasi yang mengatur tata kelola pendapatan.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Beberapa subjek



pajak dan retribusi daerah bahkan ada yang berusaha menghindari pajak dan retribusi daerah daerah.

- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- e. Ketercukupan SDM baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk taat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah.
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pajak dan retribusi daerah.
- d. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan konsep wisata kolaboratif.
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- b. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah
- c. Peningkatan sarana dan prasana sistem informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah
- d. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata
- e. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata)
- d. Pedidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
- f. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- g. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- j. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan
- k. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan (Konfirmasi Status Wajib Pajak/KSWP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan



daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana desa

a) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan dana transfer khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

- i. Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- ii. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Insentif Fiskal

Dana insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



b. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel 3.14 sebagai berikut

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2023 s/d 2024
Kabupaten Donggala

Uraian	Realisasi APBD 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.240.514.580,00	79.183.128.854,00	79.183.128.854,00	0,00
Pajak Daerah	52.959.160.580,00	56.105.292.178,00	56.105.292.178,00	0,00
Retribusi Daerah	8.114.430.929,00	2.342.333.832,00	2.342.333.832,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.959.352.481,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	40.207.570.590,00	18.235.502.844,00	18.235.502.844,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.192.872.733.468,00	1.296.130.825.000,00	1.296.130.825.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.140.973.962.314,00	1.273.929.625.000,00	1.273.929.625.000,00	0,00
Dana Perimbangan	983.159.731.710,00	1.127.795.863.000,00	1.127.795.863.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	52.357.069.324,00	54.704.586.000,00	54.704.586.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	648.794.084.000,00	740.355.145.000,00	740.355.145.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	121.960.475.157,00	157.228.978.000,00	157.228.978.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	160.048.103.229,00	175.507.154.000,00	175.507.154.000,00	0,00
Dana Insentif Fiskal (DIF)	14.542.879.000,00	7.054.868.000,00	7.054.868.000,00	0,00
Dana Desa	143.271.351.604,00	139.078.894.000,00	139.078.894.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.898.771.154,00	22.201.200.000,00	22.201.200.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	45.218.771.154,00	22.201.200.000,00	22.201.200.000,00	0,00
Bantuan Keuangan	6.680.000.000,00	0	0	0,00



Uraian	Realisasi APBD 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	20.562.496.000,00	20.562.496.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	750.000.000,00	20.562.496.000,00	20.562.496.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.299.863.248.048,00	1.395.876.449.854,00	1.395.876.449.854,00	0,00

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Penyesuaian anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, DAU Bidang Pekerjaan Umum, DAU Penggajian Formasi PPPK dan DAU Pendanaan Kelurahan. dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023
3. Penyesuaian Belanja Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun 2024 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal sebagai syarat salur Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun



2024 dan sesuai dengan target kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem serta pencegahan dan penurunan stunting tahun 2024.

4. Penyesuaian belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2024, menyesuaikan dengan RKP yang telah disetujui pada tanggal 25 April Tahun 2024 sebagai syarat salur DBH Sawit Tahun 2024
5. Pemenuhan belanja ekonomi kreatif yang mendukung sektor kepariwisataan.
6. Pemenuhan belanja untuk memenuhi kewajiban daerah antara lain penyelesaian utang pajak penerangan jalan umum, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan,
7. Penyesuaian pada Alokasi Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
8. Perubahan belanja pegawai berupa penambahan/pengurangan gaji dan tunjangan pada semua SKPD yang dihitung dan diprediksi kembali atau dirasionalisasi menggunakan daftar gaji dengan acress sebesar 2,5% dikali 14 bulan. Dan tunjangan akibat mutasi PNS antara SKPD, mutasi keluar daerah dan kedalam daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar kelompok dalam jenis belanja, antar lokasi, yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau dihapus dan ditambah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, apabila asumsi kebijakan umum APBD tidak dapat tercapai atau melampaui. Hal ini harus memperoleh persetujuan DPRD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan itu, perubahan target belanja daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dapat tersaji pada tabel berikut ini:



Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2023 s/d 2024
Kabupaten Donggala

URAIAN	REALISASI APBD 2023	APBD 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
BELANJA OPERASI	850.339.331.938,00	958.189.176.269,00	1.022.755.013.015,39	64.565.836.746,39
Belanja Pegawai	488.994.396.630,00	576.114.372.707,00	632.530.197.880,00	56.415.825.173,00
Belanja Barang dan Jasa	341.688.756.262,00	319.529.735.737,00	327.779.747.310,39	8.250.011.573,39
Belanja Hibah	9.476.518.564,00	61.045.067.825,00	61.045.067.825,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	10.179.660.482,00	1.500.000.000,00	1.400.000.000,00	-100.000.000,00
BELANJA MODAL	219.756.005.726,00	228.770.107.785,00	230.314.587.137,00	1.544.479.352,00
Belanja Modal Tanah	399.280.000,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.622.901.742,00	43.183.664.811,00	43.817.950.098,00	634.285.287,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.120.345.066,00	55.839.464.294,00	56.709.404.294,00	869.940.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.647.896.500,00	126.286.221.690,00	126.231.475.755,00	-54.745.935,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.965.582.418,00	3.460.756.990,00	3.460.756.990,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
BELANJA TRANSFER	218.070.453.980,00	220.124.850.800,00	220.124.850.800,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	5.647.133.476,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	212.423.320.504,00	218.124.850.800,00	218.124.850.800,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.288.165.791.644,00	1.413.084.134.854,00	1.479.194.450.952,39	66.110.316.098,39



3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023. Adapun pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Rencana Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp.86.318.001.098,39 Adapun rincian penggunaan SILPA pada Perubahan RKPD tahun 2024 adalah:

a. SILPA Earmark (penggunaannya sudah ditentukan) sebesar Rp.67.110.823.629,80 terdiri dari:

1. Dana BOS	Rp.	180.601.975,00
2. Dana FKTP	Rp.	3.653.171.746,01
3. Dana BLUD	Rp.	2.119.559.540,79
4. DAK Fisik	Rp.	504.857.843,00
5. DAK Non Fisik	Rp.	5.732.990.685,00
6. Dana Insentif Fiskal	Rp.	118.275.279,00
7. DAU PPPK	Rp.	50.336.489.817,00
8. DAU Kelurahan	Rp.	40.878.150,00
9. DAU Pendidikan	Rp.	1.894.296.400,00
10. DAU Kesehatan	Rp.	1.130.703.598,00
11. DAU Pekerjaan Umum	Rp.	1.398.998.596,00



- b. SILPA yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp.19.207.177.468,59 digunakan untuk pemenuhan belanja Program Prioritas Daerah.

3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang terdiri dari PT. Bank Sulteng sebesar Rp.1.000.000.000,00 dan Perumda “SAKAYA MEMBANGUN” Kabupaten Donggala sebesar Rp.2.000.000.000,00

Secara lengkap prediksi Kemampuan Keuangan Daerah pada Perubahan RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Proyeksi/Target Pendapatan dan Belanja Daerah
RKPD Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.581.839.960,00	79.183.128.854,00	79.183.128.854,00	0,00
Pajak Daerah	50.105.292.178,00	56.105.292.178,00	56.105.292.178,00	0,00
Retribusi Daerah	4.660.872.750,00	2.342.333.832,00	2.342.333.832,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.490.628.579,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	30.325.046.453,00	18.235.502.844,00	18.235.502.844,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.271.926.783.472,00	1.296.130.825.000,00	1.296.130.825.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.249.725.583.472,00	1.273.929.625.000,00	1.273.929.625.000,00	0,00
Dana Perimbangan	1.097.709.160.513,00	1.127.795.863.000,00	1.127.795.863.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	37.499.697.252,00	54.704.586.000,00	54.704.586.000,00	0,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	687.803.944.692,00	740.355.145.000,00	740.355.145.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	175.974.093.148,00	157.228.978.000,00	157.228.978.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	196.431.425.421,00	175.507.154.000,00	175.507.154.000,00	0,00
Dana Insentif Fiskal (DIF)	0,00	7.054.868.000,00	7.054.868.000,00	0,00
Dana Desa	152.016.422.959,00	139.078.894.000,00	139.078.894.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.201.200.000,00	22.201.200.000,00	22.201.200.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	22.201.200.000,00	22.201.200.000,00	22.201.200.000,00	0,00
Bantuan Keuangan	0	0	0	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	20.562.496.000,00	20.562.496.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	20.562.496.000,00	20.562.496.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.359.508.623.432,00	1.395.876.449.854,00	1.395.876.449.854,00	0,00
BELANJA OPERASI	954.125.006.811,00	958.189.176.269,00	1.020.795.507.508,39	62.606.331.239,39
Belanja Pegawai	567.324.574.815,00	576.114.372.707,00	613.646.308.734,00	37.531.936.027,00
Belanja Barang dan Jasa	314.386.126.096,00	319.529.735.737,00	338.708.130.947,39	19.178.395.210,39
Belanja Hibah	62.932.182.002,00	61.045.067.825,00	67.041.067.827,00	5.996.000.002,00
Belanja Bantuan Sosial	9.482.123.898,00	1.500.000.000,00	1.400.000.000,00	-100.000.000,00
BELANJA MODAL	164.283.355.656,00	228.770.107.785,00	232.274.092.644,00	3.503.984.859,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.010.858.164,00	43.183.664.811,00	44.849.186.589,00	1.665.521.778,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.099.183.679,00	55.839.464.294,00	57.333.604.294,00	1.494.140.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.688.090.648,00	126.286.221.690,00	126.230.544.771,00	-55.676.919,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.485.223.165,00	3.460.756.990,00	3.465.756.990,00	5.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.102.704.592,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	7.102.704.592,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
BELANJA TRANSFER	229.557.316.371,00	220.124.850.800,00	220.124.850.800,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	229.557.316.371,00	218.124.850.800,00	218.124.850.800,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.355.068.383.430,00	1.413.084.134.854,00	1.479.194.450.952,39	66.110.316.098,39
Surplus/Defisit	4.440.240.002,00	- 17.207.685.000,00	- 83.318.001.098,39	- 66.110.316.098,39
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	20.207.685.000,00	86.318.001.098,39	66.110.316.098,39
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	20.207.685.000,00	86.318.001.098,39	66.110.316.098,39
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.440.240.002,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Kepada BUMD	4.440.240.002,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
- PT BANK SULTENG	2.440.240.002,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Selisih Target RKPD Perubahan Terhadap Target APBD 2024
- PERUMDA SAKAYA MEMBANGUN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	- 4.440.240.002,00	17.207.685.000,00	83.318.001.098,39	66.110.316.098,39
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 perubahan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, RPJPD Kabupaten Donggala 2005–2025, mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dan juga berpedoman pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP Tahun 2024 serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 dengan Visi Pembangunan Daerah yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal”** dan dengan serangkaian misi:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM
2. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

Visi pembangunan ini masih merujuk pada Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020- 2024 yaitu **“Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sendiri mengusung Tema Pembangunan Nasional yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. sedangkan tema



RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Kualitas Pembangunan Sebagai Daerah Penyangga IKN Serta Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Penurunan Stunting”**.

Sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2024 Perubahan, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan diwujudkan sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM							
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	59,8	71,25	71,25
		1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3	4,1	4,1
			Opini BPK terhadap LKPD	Kategori	WDP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	2,92	3,45	3,45
		2 Meningkatnya Kapabilitas dan profesionalisme aparatur	Rata-rata Nilai Rapor Kinerja ASN pada semua Perangkat Daerah	Nilai	na	76	76
		3 Terciptanya suasana kondusif, kerukunan dan solidaritas antar warga masyarakat	Persentase Terjadinya Perkelaian masyarakat/ Perkelahian Antar Desa (PAD)	Persen	0%	0%	0%
		4 Meningkatnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian Masyarakat terhadap nilai-nilai Kemanusiaan dan Hak Azazi Manusia	Persentase terjadinya konflik di masyarakat yang bernuansa SARA	Persen	0%	0%	0%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		5 Meningkatnya kesiagaan Masyarakat menghadapi bencana alam	Persentase Menurunnya jumlah korban bencana	Persen	50%	75%	75%
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang efektif dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks	65	80	80
		1 Meningkatnya pelayanan Publik yang cepat dan Prima	Persentase PD yang melayani masyarakat tepat dan cepat	Persen	70%	80%	80%
		2 Mewujudkan administrasi kearsipan dan pelestarian dokumen daerah	Persentase tingkat pengelolaan kearsipan sesuai standar teknis	Persen	75%	80%	80%
3. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang merata	Persentase Peserta BPJS			Persen	60%	75%	75%
		1 Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang sosial	Persentase peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang sosial	Persen	90%	90%	90%



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
Misi 2 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan							
1. Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya (Pemerintah dan Masyarakat)	Persentase Sumber Daya yang dioptimalkan			Persen	25%	60%	60%
		1. Optimalnya peran aktif aparatur pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang membuat Dokumen Perencanaan sesuai standar teknis	PD	25 PD	54 PD	54 PD
		2 Meningkatnya partisipasi Masyarakat secara konstruktif dalam pelaksanaan program pembangunan (pembangunan partisipatif)	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang	Persen	70%	90%	90%
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penyediaan Energi (semua terdapat di bumi baik yang hidup maupun yang mati yang berguna bagi manusia)	Persentase pengelolaan SDA untuk penyediaan Energi Baru dan Terbarukan			Persen	10%	25%	25%
		1. Terkelolanya sumber daya hutan secara berkelanjutan, produktif dan bermutu dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan	Persentase luasan hutan Produktif yang dikelola masyarakat yang ramah lingkungan	Persen	35%	70%	70%
		2 Meningkatnya luas hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR) yang berorientasi pada kearifan lokal	Persentase meningkatnya HTR, HKM, HD dan HR sesuai kearifan lokal	Persen	40%	70%	70%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		3 Meningkatnya peran aktif dan kesadaran para pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam	Persentase luasan hutan yang terjaga kelestarian SDA sesuai standar teknis	Persen	70%	80%	80%
		4 Meningkatnya penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat khususnya daerah terpencil dan kepulauan	Rasio Elektrifikasi daerah terpencil dan Kepulauan	Rasio	94%	100%	100%
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (Pasar/DUDI)	Persentase potensi ekonomi yang dikelola			Persen	40%	65%	65%
		1 Lahirnya regulasi yang dapat menjamin peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan	Jumlah Perkada tentang peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan yang diterbitkan	Perbup	1	4	4
		2 Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Kelompok Usaha Mikro yang mengalami peningkatan aset	KUM	1.000	1.500	1.500
		3 Meningkatnya kerjasama ekonomi, kegiatan ekspor dan perdagangan dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan volume Ekspor komoditas unggulan daerah	Persen	10%	18%	18%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		4. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra-sentra industri potensial yang terbentuk	Sentra	3 sentra	8 sentra	8 sentra
4. Mengembangkan obyek wisata	Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan			Objek Wisata	10 OW	25 OW	25 OW
		1 Terlaksananya Inventarisasi Destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang terinventarisir secara lengkap	Objek Wisata	25 OW	45 OW	45 OW
		2 Meningkatnya aksesibilitas obyek wisata	Jumlah destinasi wisata yang memiliki akses memadai	Objek Wisata	5 OW	20 OW	20 OW
Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan							
1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata guna meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, beriman dan bertaqwa	Indeks Pendidikan			Indeks	66,65	73,75	73,75
		1 Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas	Persentase capaian SPM pendidikan	Persen	60%	80%	80%
		2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar	Persentase Guru (PAUD, SD, SMP) memiliki kuafikasi S1 atau D4	Persen	65%	85%	85%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		3 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Persentase standar sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persen	35%	65%	65%
2. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pembentukan lembaga adat	Jumlah Desa yang menerapkan nilai – nilai budaya dan adat istiadat dalam interaksi sosial dan lingkungan			Desa	5 desa	25 desa	25 desa
		1 Terwujudnya pembentukan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal	Jumlah Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai- nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal	Lembaga	5 lembaga	25 lembaga	25 lembaga
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Indeks Kesehatan			Indeks	64,66	71,65	71,65
		1 Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan gratis	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat JKM	Orang	55.450	30.550	30.550
		2 Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah rumah sakit, puskesmas, Pustu dan Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai	Rs	2	2	2
				Puskesmas	16	22	22
				Pustu	15	25	25
				Poskesdes	60	80	80



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Persentase peningkatan Tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai standar	Persen	5%	30%	30%
		4 Tersedianya obat yang berkualitas	Persentase jumlah jenis obat yang tersedia sesuai kebutuhan	Persen	25%	60%	60%
		5 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase balita penderita Gizi Buruk	Persen	0,50%	0,01%	0,01%
4. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Asektor KB			Orang	30,000	60,000	60,000
		1 Terwujudnya Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera	Persentase Keluarga yang menerapkan pola hidup sehat	Persen	45%	75%	75%
5. Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olahraga	Jumlah organisasi pemuda untuk pengembangan bakat dan minat yang dibina			Orang	30 org	75 org	75 org
		1 Meningkatnya ketersediaan Fasilitas olahraga	Persentase fasilitas olahraga yang tersedia secara memadai sesuai cabang olahraga	Persen	10%	40%	40%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2 Meningkatnya Pengembangan Potensi dan peran serta pemuda	Persentase peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Persen	40%	75%	75%
6. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan Peran Perempuan	Persentase partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Daerah			Persen	10%	35%	35%
		1 Terwujudnya pengarusutamaan Gender	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender	Persen	10%		1.
		2 Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aspek	Persentase Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persen	10%	35%	35%
		3 Terwujudnya pemenuhan Hak perempuan dan anak	Persentase Meningkatnya Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan	Persen	60%	85%	85%



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah							
1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Persentase tersedianya Infrastruktur Dasar yang memadai			Persen	10%	35%	35%
		1 Terwujudnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang membuka keterisolasian wilayah	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap pada wilayah (Kecamatan dan Desa) tertinggal atau sangat tertinggal	Persen	30%	55%	55%
		2 Terwujudnya pengelolaan sungai, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	45,60%	65%	65%
2. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkualitas	Persentase tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memenuhi standar			Persen	40%	55,00%	55,00%
		1 Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan (Darat dan Laut) yang memadai dan berfungsi dengan baik	Persen	40%	55,00%	55,00%
3. Mewujudkan Penataan Ruang dan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pemanfaatan ruang dan lingkungan sehat perumahan			Persen	60%	85%	85%
		1 Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai perda	Persen	80%	100%	100%



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2 Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan Lingkungan Perumahan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase pengelolaan lingkungan perumahan yang memenuhi standar teknis	Persen	80%	100%	100%
4. Mewujudkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Pencemaran Lingkungan			Indeks	na	na	na
		1 Terwujudnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	na	na	na
		2 Terwujudnya Perlindungan dan Pengendalian kawasan konservasi	Persentase terjaganya kawasan konservasi	Persen	70%	100%	100%
5. Mewujudkan Reformasi Agraria dan Penyelesaian konflik pertanahan	Persentase Penduduk yang memiliki sertifikat Hak Milik Tanah			Persen	25%	70%	70%
		1 Terwujudnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase pemilik tanah yang memiliki sertifikat	Persen	25%	70%	70%
Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan							
1. Mewujudkan Kualitas hidup masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	PDRB atas harga berlaku			Persen	12,25	41,4	41,4
		1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal	Persentase pertumbuhan ekonomi sector potensi unggulan daerah	Persen	5,00%	6,50%	6,50%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2 Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan	Persentase penurunan masyarakat miskin	Persen	18,4	13,82	13,82
		3 Terbangunnya sistim dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang kuat, berdaya saing dan mandiri	Jumlah BUMDesa yang berfungsi secara aktif	Bumdes			
		4 Meningkatnya keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan berkeadilan gender	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan Gender	Persen	20%	50%	50%
		5 Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat	Persentase TPAK	Persen	60%	80%	80%
		6 Tersedianya tata ruang publik yang ramah bagi perempuan dan anak (Penyediaan fasilitas pojok laktasi dan nutrisi di ruang publik)	Persentase fasilitas publik yang ramah bagi anak dan perempuan	Persen	10%	35%	35%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target 2024	Kinerja Akhir Periode RPJMD
		7 Menguatnya kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak dan efektifnya kerjasama PPA, LSM dan jaringan lainnya yang koseran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	1%	0,00%	0,00%
		8 Berkembangnya aktivitas agribisnis dan agroindustri, serta agropolitan pada lokasi yang potensial dan prospektif	Jumlah Kawasan Tertentu cepat tumbuh sesuai potensi unggulan kawasan perdesaan	Kawasan	0	6	6



Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Donggala yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri dan Berkarakter dengan Berpijak pada Nilai Kearifan Lokal”

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Inovatif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik pada semua tingkat pemerintahan
		Meningkatkan penataan organisasi, tatalaksana dan tertib regulasi
		Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan
		Meningkatkan pengawasan internal pemerintah daerah
	Meningkatnya Kapabilitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan koordinasi lintas PD
	Terciptanya suasana kondusif, kerukunan dan solidaritas antar warga masyarakat	Meningkatkan toleransi dan solidaritas antar warga masyarakat
		Meningkatkan wawasan kebangsaan
	Meningkatnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian Masyarakat terhadap nilai- nilai Kemanusiaan dan Hak Azazi Manusia	Meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia
	Meningkatnya kesiagaan Masyarakat menghadapi bencana alam	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam



MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang efektif dan transparan	Meningkatnya pelayanan Publik yang cepat dan Prima	Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi
	Mewujudkan administrasi kearsipan dan pelestarian dokumen daerah	Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kearsipan optimal
Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial yang merata	Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat penyandang sosial	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial
Misi 2 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan berbasis Kerakyatan		
Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya (Pemerintah dan Masyarakat)	Optimalnya peran aktif aparatur pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan penyusunan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya partisipasi Masyarakat secara konstruktif dalam pelaksanaan program pembangunan (pembangunan partisipatif)	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi (Pasar/DUDI)	Lahirnya regulasi yang dapat menjamin peningkatan PAD serta stabilitas harga dan kepastian pasar secara berkelanjutan	Mewujudkan lahirnya regulasi yang menjamin stabilitas harga dan kepastian pasar
	Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Memberikan pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima dan asongan
	Meningkatnya kerjasama ekonomi, kegiatan eskpor dan perdagangan dengan dunia usaha dan dunia industri sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan kerjasama ekonomi untuk mendukung kegiatan ekspor dan perdagangan



MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan dukungan dalam pengembangan IKM
		Meningkatkan kemampuan iptek dalam pengembangan IKM
		Mengembangkan sentra- sentra industri potensial
Mengembangkan obyek wisata	Terlaksananya Inventarisasi Destinasi wisata	Mengembangkan keunggulan dan daya tarik wisata potensial
	Meningkatnya aksesibilitas obyek wisata	
Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetitif berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan		
Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata guna meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif, beriman dan bertaqwa	Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar
		Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua
		Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar	Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pembentukan lembaga adat	Terwujudnya pembentukan lembaga adat untuk melestarikan nilai-nilai Budaya Masyarakat dan kearifan lokal	Penguatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya di masyarakat
		Pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan
		Mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah
		Mendorong kerja sama antar daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya



MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan gratis	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara merata
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
	Tersedianya obat yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan obat yang berkualitas
	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Meningkatkan pelayanan gizi masyarakat
Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Terwujudnya Pembinaan Keluarga Sehat dan Sejahtera	Mendorong kesadaran masyarakat dan meningkatkan pelayanan KB dan penanggulangan HIV/AIDS
		Meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak dan bina keluarga
Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya ketersediaan Fasilitas olahraga	Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga
	Meningkatnya Pengembangan Potensi dan peran serta pemuda	
Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan Peran Perempuan	Terwujudnya pengarusutamaan Gender	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
	Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aspek	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan
	Terwujudnya pemenuhan Hak perempuan dan anak	Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah		
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Terwujudnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang membuka keterisolasian wilayah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan



MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya pengelolaan sungai, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
		Meningkatkan penyediaan air baku dan pengelolaan limbah
Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Mewujudkan Penataan Ruang dan Lingkungan Sehat Perumahan	Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan Lingkungan Perumahan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan pengelolaan lingkungan perumahan dan areal perumahan
		Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Mewujudkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan konservasi sumber daya alam	Terwujudnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan	meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	Terwujudnya Perlindungan dan Pengendalian kawasan konservasi	Meningkatkan pengawasan pada kawasan konservasi
Mewujudkan Reformasi Agraria dan Penyelesaian konflik pertanahan	Terwujudnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatkan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan		
Mewujudkan Kualitas hidup masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan potensi lokal	Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
		Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)



MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan	Meningkatkan hasil produksi pertanian dan Perkebunan
		Meningkatkan hasil produksi Peternakan
		Meningkatkan hasil produksi Kelautan dan Perikanan
		Meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, pesisir dan nelayan
	Terbangunnya sistim dan kelembagaan ekonomi perdesaan yang kuat, berdaya saing dan mandiri	Meningkatkan sistem dan kelembagaan Pemerintah Desa
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial, politik dan budaya berbasis kearifan lokal dan berkeadilan gender	
	Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat	Meningkatkan Kesempatan dan lapangan Kerja.
	Tersedianya tata ruang publik yang ramah bagi perempuan dan anak (Penyediaan fasilitas pojok laktasi dan nutrisi di ruang publik)	Menguatkan kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak.
	Menguatnya kelembagaan Pusat Pelayanan terpadu perempuan dan anak dan efektifnya kerjasama PPA, LSM dan jaringan lainnya yang koseran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	
	Berkembangnya aktivitas agribisnis dan agroindustri, serta agropolitan pada lokasi yang potensial dan prospektif	Mengembangkan aktivitas agribisnis dan agroindustry

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (1) dan (6) huruf c.

Berdasarkan hal tersebut diatas Prioritas Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi, Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator makro lainnya menunjukkan trend peningkatan kurun waktu tiga tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlunya penyesuaian Kembali terhadap target-target yang ditetapkan berdasarkan asumsi sebelumnya serta hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai aturan yang berlaku.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024, maka arah kebijakan Kabupaten Donggala tahun 2024 ditujukan untuk **“Pemantapan Penyangga IKN, Pengentasan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Penataan Manajemen ASN, Penyediaan SDM serta Peningkatan Kapasitas Fiskal”** dengan arah kebijakan meliputi :

1. Pemantapan implementasi Kabupaten Donggala sebagai daerah penyangga bagi IKN di Provinsi Kalimantan Timur
2. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan angka stunting
3. Penataan Manajemen ASN berbasis Kompetensi
4. Penyediaan SDM sesuai kebutuhan Daerah
5. Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan fokus pada sektor Pariwisata, Pertanian, Peternakan, perikanan dan perkebunan.

Memperhatikan prioritas pembangunan daerah di atas serta capaian tahun sebelumnya, maka target indikator makro pada Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,68-5,11 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,79-2,66 persen
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 15,30 – 15,18 persen



4. Angka Penurunan Stunting sebesar 20,47-15,28
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,17-70,19
6. Indeks Gini sebesar 0,237-0,210

Prioritas pembangunan Kabupaten Donggala tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Donggala tahun 2024. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kabupaten Donggala tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024

No.	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS TAHUN 2024
1.	Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar	Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)	Pemantapan Implementasi Kabupaten Donggala sebagai Daerah penyangga bagi IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
		Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana Alam	
2.	Persentase penduduk miskin masih di atas persentase Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	Kemiskinan Ekstrem	Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
3.	Meningkatnya angka Stunting	Stunting	
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang belum optimal	Reformasi Birokrasi	Penataan Manajemen ASN berbasis Kompetensi
5.	Manajemen kpegawaian yang belum terlaksana secara maksimal		



No.	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS TAHUN 2024
6.	Masih rendahnya nilai pelaporan kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi		Penyediaan SDM sesuai kebutuhan Daerah
7.	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap kapasitas fiskal daerah	Kebijakan Fiskal	Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan fokus pada sektor Pariwisata, Pertanian, Peternakan, perikanan dan perkebunan.

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah tahun 2024 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 4.4

Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Perubahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
1. Pemantapan Implementasi Kabupaten Donggala sebagai Daerah penyangga bagi IKN di Provinsi Kalimantan Timur.				
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap pada wilayah (Kecamatan dan Desa) tertinggal atau sangat tertinggal	55%	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik	65%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
	Jumlah Kawasan Tertentu cepat tumbuh sesuai potensi unggulan kawasan perdesaan	6 kawasan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
2. Pengentasan Kemiskinan dan penurunan Stunting				
	Persentase Penurunan Masyarakat Miskin	15,30% - 15,18%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DTPHP
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DTPHP
			Program Penyuluhan Pertanian	DTPHP
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Program peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan UMKM
			Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi dan UMKM
	Persentase Penurunan Angka Stunting	20,47 - 15,28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Penataan Manajemen ASN berbasis Kompetensi				
	Rata-rata Nilai Raport Kinerja ASN pada semua Perangkat Daerah	76	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	semua OPD
4. Penyediaan SDM sesuai kebutuhan Daerah				
	Rata-rata Nilai Raport Kinerja ASN pada semua Perangkat Daerah	76	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	semua OPD



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024		
5. Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan fokus pada sektor Pariwisata, Pertanian, Peternakan, perikanan dan perkebunan.				
	Persentase PAD terhadap pendapatan	6,79	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan



4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Donggala dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dan arah kebijakan nasional tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing sebagai Motor Pergerakan Utama Perekonomian Daerah	1	Pemantapan Implementasi Kabupaten Donggala sebagai Daerah penyangga bagi IKN di Provinsi Kalimantan Timur.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Peningkatan Daya Saing Produk dan Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Kewilayahan yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	5	Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan fokus pada sektor Pariwisata, Pertanian, Peternakan, perikanan dan perkebunan.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
4	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3	Konektivitas antar Wilayah melalui Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Daerah yang dapat Memberikan Stimulasi	1	Pemantapan Implementasi Kabupaten Donggala sebagai Daerah penyangga bagi IKN di



NASIONAL		PROVINSI		DAERAH	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Tumbuhnya Investasi yang Lebih Berkualitas di Daerah		Provinsi Kalimantan Timur.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting	2	Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	5	Percepatan Reformasi Birokrasi	3	Penataan Manajemen ASN berbasis Kompetensi
				4	Penyediaan SDM sesuai kebutuhan Daerah

4.4. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

Program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tri wulan III dan tri wulan IV tahun 2024, didasarkan pada Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024 yang telah dideskripsikan dalam BAB 4, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten Donggala Tahun 2019-2024.

Pembahasan substansi pada BAB 5 diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD tahun 2023 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian program pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Donggala pada Tri Wulan III dan Tri Wulan IV tahun anggaran 2024. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dengan berbagai pendekatan.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah guna mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bawah-atas (*bottom up*), atas-bawa (*top-down*), dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Donggala.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024, hal ini berarti RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam

melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terbatas (internal Bappeda) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan dalam perubahan RKPD Tahun 2024.

2. Pendekatan partisipatif dan bawah atas (*bottom-up*) dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui:
 - a. Telaah hasil musrenbang RKPD yang disesuaikan dengan keadaan pada semester II tahun 2024;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui pelibatan masyarakat setelah beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan;
 - c. Mempertimbangkan keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, termasuk kaum perempuan atau stake holder yang disampaikan pada setiap pertemuan-pertemuan tertentu;
3. Pendekatan atas bawah (*top-down*) yang dilaksanakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui:
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.

5.1. RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Ringkasan anggaran pagu indikatif Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Perubahan RKPD 2024 bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen Perubahan RKPD 2024 merupakan indikasi yang hendak



dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam perubahan RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (Perubahan KUA-PPAS) Tahun 2024. Hal-hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) adalah sebagai berikut:

A. Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

C. Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/Kabupaten dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

Secara rinci rumusan program prioritas perangkat daerah beserta ringkasan anggarannya dapat terlihat pada Tabel 5.1 berikut:



Tabel 5.1
Ringkasan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang Dikelompokkan
Berdasarkan Misi, Tujuan Urusan dan OPD Penanggung jawab
Kabupaten Donggala Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

MISI	TUJUAN	URUSAN	ANGGARAN (RP)		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Misi I: Reformasi Birokrasi, Suprermasi Hukum dan Kemanusiaan dan HAM	1.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dan transparan.	Urusan Fungsi penunjang pemerintah Daerah			
		Sekretariat Daerah	31.356.603.718	22.156.971.956	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD	31.859.857.057	29.896.833.872	Sekretariat DPRD
		Perencanaan	9.901.011.271	8.541.060.393	Bappeda
		Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	336.035.365.489	404.899.113.820	BPKAD
		Pendapatan Daerah	14.949.386.076	12.994.410.155	Dinas Pendapatan Daerah
		Inpektorat	9.069.086.097	9.729.018.425	Inspektorat
		Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM	8.096.329.653	7.459.929.226	BKPSDM
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.247.709.907	2.806.002.093	Balitbangda
		Kec Rio Pakava	1.883.302.022	1.199.966.993	Kec Rio Pakava
		Kec. Pinembani	1.329.128.048	863.666.982	Kec. Pinembani
		Kec. Banawa	12.891.972.898	8.456.049.980	Kec. Banawa
		Kec. Banawa Selatan	1.700.266.361	1.337.250.279	Kec. Banawa Selatan
		Kec. Banawa Tengah	1.806.418.681	1.244.953.592	Kec. Banawa Tengah
		Kec. Tanantovea	2.715.490.580	2.282.711.782	Kec. Tanantovea
		Kec. Labuan	2.330.275.369	2.140.812.002	Kec. Labuan
		Kec. Sindue	2.225.624.267	1.957.581.803	Kec. Sindue
		Kec. Sindue Tombusabora	1.102.088.137	968.874.062	Kec. Sindue Tombusabora
		Kec. Sindue Tobata	1.526.811.243	1.048.334.914	Kec. Sindue Tobata
		Kec. Sirenja	2.463.315.891	1.708.593.381	Kec. Sirenja



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



MISI	TUJUAN	URUSAN	ANGGARAN (RP)		ORGANISASI
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	PERANGKAT DAERAH
		Kec. Balaesang	1.995.693.444	1.339.546.561	Kec. Balaesang
		Kec. Balaesang Tanjung	1.640.125.123	1.167.226.122	Kec. Balaesang Tanjung
		Kec. Sojol	1.966.975.488	1.253.236.346	Kec. Sojol
		Kec. Sojol Utara	1.525.686.402	839.211.099	Kec. Sojol Utara
		Kec. Dampelas	2.421.839.052	1.455.999.643	Kec. Dampelas
		Komunikasi dan Informatika	3.598.848.084	2.885.756.339	Dinas Kominfo
		Kearsipan	2.544.218.818	1.755.122.083	Dinas Arsip Daerah
		Sosial	5.374.468.520	4.127.500.311	Dinas Sosial
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.021.569.006	7.323.301.177	Dinas Kependudukan & Capil
TOTAL VISI I			503.579.466.702	543.839.035.391	40.259.568.689
Misi II Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan yang Kompetitif dan Berbasis Kerakyatan	2.1. Mewujudkan pengeloaan sumber daya pembangunan yang kompetitif dan berbasis kerakyatan	Penanaman Modal	3.437.426.836	2.939.081.845	Penanaman Modal dan PTSP
		Transmigrasi	3.772.020.043	3.670.913.773	Dinas Nakertrans
		Tenaga Kerja			
		Pariwisata	3.623.042.997	5.690.167.045	Dinas Pariwisata
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.648.415.630	8.331.935.673	Dinas PMD
TOTAL VISI II			17.480.905.506	20.632.098.336	3.151.192.830
Misi III Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kompetitif Berlandaskan Keimanan dan Ketaqwaan	3.1 Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang merata guna menngkatkan kualitas SDM yang kompetitif beriman dan bertaqwa	Pendidikan	389.098.728.239	395.350.812.635	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perpustakaan	2.485.669.744	2.410.391.177	Dinas Perpustakaan
	3.2 Mewujudkan pelestarian niai-nilai budaya masyarakat dan pembentukan budaya adat	Kebudayaan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



MISI	TUJUAN	URUSAN	ANGGARAN (RP)		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
	3.3 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Kesehatan	146.866.479.311	143.567.085.301	Dinas kesehatan
		(Kesehatan Rujukan)	30.170.625.728	43.735.112.549	RSUD Kabelota
		(Kesehatan Rujukan)	3.095.172.745	7.020.000.000	Rumah Sakit Pratama Tambu
	3.4 Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.133.800.734	16.117.391.134	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.5 Mengembangkan Potensi Pemuda dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga	5.596.128.378	5.217.365.677	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	3.6 Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Peran Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	3.123.200.239	2.886.565.648	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL VISI III			591.569.805.118	616.304.724.121	24.734.919.003
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	4.1 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pekerjaan Umum	110.322.334.999	134.069.068.039	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4.2 Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkualitas	Perhubungan	6.110.945.856	5.284.913.010	Dinas Perhubungan
	4.3 Mewujudkan Penataan Ruang dan Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penataan Ruang	13.096.406.934	5.516.123.348	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
		Lingkungan Hidup	4.453.181.963	9.695.131.539	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat "Badan kesatuan Bangsa dan Politik"	29.355.351.141	64.247.381.262	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024



MISI	TUJUAN	URUSAN	ANGGARAN (RP)		ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
TOTAL VISI IV			163.338.220.893	218.812.617.198	55.474.396.305
Misi V: Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat "Satuan Polisi Pamong Praja"	5.120.862.469	3.768.023.285	Badan Satuan Polisi Pamong Praja
		Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat "Badan Penanggulangan Bencana Daerah"	7.364.474.578	5.975.238.115	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	4.015.788.012	1.926.041.020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Perindustrian dan Perdagangan	6.441.746.347	2.614.812.535	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pangan	7.116.521.926	3.860.845.313	Dinas Ketahanan Pangan
		Pertanian	23.848.995.955	27.374.887.087	Dinas PTHP
		Pertanian (Peternakan)	7.944.728.591	9.712.893.313	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Perikanan	17.246.867.333	24.373.235.239	Dinas Perikanan
TOTAL VISI V			79.099.985.211	79.605.975.907	505.990.696
TOTAL			1.355.068.383.430	1.479.194.450.952	124.126.067.522



5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Program dan kegiatan perangkat daerah pada semester II tahun 2024 merupakan rekapitulasi dari hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- b. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- c. Indikator Kinerja;
- d. Lokasi Kegiatan;

Target Kinerja capaian program;

- a. Besaran dana yang dibutuhkan;
- b. Target kinerja capaian program/kegiatan.

Dalam pembagian pagu indikatif untuk beberapa program dalam RKPD tahun 2024 berbeda dengan perubahan RKPD tahun 2024. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan dari peraturan yang lebih tinggi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional terutama perubahan program Prioritas Provinsi maupun Prioritas Nasional pada semester II tahun 2024. Dimana program prioritas Provinsi maupun Nasional tersebut ada beberapa belum termuat dalam RKPD sebelum perubahan.

Uraian lebih rinci terkait program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Donggala setelah perubahan RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2024 (diambil dari SIPD).



BAB VI

PENUTUP

Sehubungan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menerapkan prinsip-prinsip afisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “Kerangka Regulasi” maupun dalam “Kerangka Anggaran”, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam kaitan tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Donggala menganut falsafah kinerja “*Hasil Yang Luar Biasa Hanya Akan Dicapai Dengan Cara-cara Yang Tidak Biasa*”. Falsafah ini mengandung makna sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil terbaik harus terus menerus melakukan inovasi atau dalam Bahasa lain “Inovasi Tiada Henti”;
2. Untuk mencapai hasil terbaik Harus berani tampil beda atau berbeda dengan biasanya dalam arti positif;
3. Untuk mencapai hasil terbaik haruslah melakukan upaya “Lakukan apa saja sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, norma dan etika”.

Indikator target kinerja dalam Perubahan RKPD Kabupaten Donggala tahun 2024 dirumuskan dengan perhitungan yang cermat dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan acaman yang akan terjadi serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Donggala tahun 2019-2024. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka indikator kinerja dalam perubahan RKPD tahun 2024 lebih dalam dan lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*).

Namun demikian, capaian target kinerja dalam akan sangat ditentukan dengan sejumlah asumsi atau syarat-syarat sebagai berikut:



1. Sumber Daya Aparatur pelaksana program dan Kegiatan (ASN) memiliki standar kompetensi yang memadai,
2. Pejabat struktural terutama Kepala Perangkat Daerah menerapkan konsep manajemen organisasi secara konsisten, yaitu *Planning, actuating, controlling and evaluating*.
3. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah memiliki standar kompetensi yang memadai, yaitu telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan Tematik (Diklat Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja)
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah memiliki disiplin mental kerja yang tinggi;
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah memiliki mental profesional dalam melaksanakan tugas;
6. Setiap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selalu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
7. Pemerintah menerapkan kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) bagi ASN yang berprestasi dan sanksi/hukuman (*punishment*) bagi yang bersalah secara wajar;
8. Pemberian tunjangan penghasilan kepada pejabat dan staf didasarkan pada prestasi kinerja;

Kedelapan syarat di atas merupakan indikator yang akan sangat menentukan keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Daerah. Pada akhirnya kebersamaan semua pihak dan memegang teguh komitmen “Bekerja Adalah Ibadah dan Amal Jariah” yang akan memandu semua pihak untuk mencapai puncak.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang akan melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024, dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala tahun 2019 – 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA